



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PARTAHI TULUS HUTAPEA
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 10824

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 838.268.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/72 m2 di SIMALUNGUN,
HASIL SENDIRI Rp. 38.268.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 243.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER KF MINIBUS Tahun 1997,
HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
3. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.150.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 109.991.010

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.249.409.010

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.249.409.010

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.